

PERAN PENYULUHAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA (KB) DI KECAMATAN
TELUK BETUNG TIMUR KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2022

Ledy Octaviani Iqmy ¹, Vida Wira Utami ²

Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Malahayati
Program Studi DIII Kebidanan Universitas Malahayati Bandar Lampung
E-mail: ladyunimal@gmail.com

ABSTRAK

Secara garis besar program keluarga berencana (KB) ini merupakan salah satu upaya yang paling efektif diterapkan untuk mengendalikan jumlah penduduk sekaligus meningkatkan kehidupan masyarakat yang lebih baik khususnya bagi keluarga yang kurang mampu (miskin). Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Peran Penyuluhan Program Keluarga Berencana (KB) dan untuk mengetahui terkait faktor pendukung serta penghambat dalam pengendalian pertumbuhan penduduk di Kecamatan Teluk betung Timur Kota Bandar Lampung. Metode pelaksanaan yang dilakukan yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian dari Peran Penyuluhan Program Keluarga Berencana (KB) di Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung berjalan kurang baik karena masih terdapat banyak masyarakat yang kurang mengerti pentingnya KB dan kinerja dari PKB yang kurang maksimal. Faktor pengambat Peran Penyuluhan Program Keluarga Berencana (KB) di Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung ialah masih kurangnya sosialisasi penyuluh KB kepada masyarakat, belum adanya kerjasama antara PKB dan pemerintah dalam anggaran dana untuk program KB.

Kata Kunci: Program Keluarga Berencana, Peran, Penyuluhan Keluarga Berencana

ABSTRACT

Broadly speaking, the family planning program (KB) is one of the most effective measure implemented to control the population while at the same time improving people's lives, especially for the poor. The purpose of this study was determine the role of family planning program (KB) counseling and to determine the supporting and inhibiting factors in controlling population growth in Teluk Betung Timur District, Bandar Lampung City. The implementation method is carried out by observation, interviews and documentation. The results of the study of the role of family planning program (KB) extension did not go well did not understand the importance of family planning and the performance of PKB was not optimal. The inhibiting factor for the role of family planning program (KB) extension in Teluk Betung Timur District, Bandar Lampung City is the lack of socialization of family planning instructors to the community, the absence of cooperation between PKB and the government in the budget for the family planning program.

Keywords: Family planning program, Role, Family Planning Counseling

1. PENDAHULUAN

Masalah kependudukan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang salah satunya ialah Indonesia pada umumnya yaitu tentang jumlah penduduk yang besar, pertumbuhan yang tinggi, persebaran tidak merata dan kualitas rendah. Sampai pada tahun (2019), Indonesia masih tercatat sebagai negara dengan penduduk terbanyak di dunia setelah Tiongkok, India dan Amerika. Fakta ini tentunya menjadi bukti bahwa Indonesia masih menghadapi masalah kependudukan. Untuk mengatasi masalah perkebangan bidang kependudukan ini, perlu adanya suatu peraturan dan kebijakan pemerintah. Agar pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat dapat terlaksana dengan baik.

Kebijakan tentang keluarga berencana (KB) tertuang dalam UU No.52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, menyebutkan bahwa dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas dilakukan upaya pengendalian angka kelahiran, sehingga penduduk menjadi sumber daya manusia yang Tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional. Kebijakan ini tentunya diwujudkan pemerintah melalui sejumlah upaya, salah satunya melalui pemberian layanan KB gratis bagi masyarakat yang tergolong kurang mampu.

Layanan Keluarga Berencana (KB) gratis tentunya sudah banyak dirasakan oleh masyarakat yang kurang mampu, namun pelayanan KB sendiri masih belum efektif dilakukan karena dengan rendahnya komitmen terhadap KB (Bapennas, 2010). Catatan tersebut tentunya diperkuat oleh temuan (Nurmahdalena et al., 2016); (Utami et al., 2020), dan (Suwardono et al., 2020) yang menunjukkan adanya angka kerendahan dari akseptor KB oleh PUS kurang mampu yang berada di beberapa wilayah Indonesia.

Berkenaan dengan hal tersebut, peran penyuluhan termasuk di dalamnya penyuluh KB menjadi sangat penting untuk meningkatkan pemahaman kepada masyarakat tentang KB. Sebagaimana diungkap dalam salah satu penelitian terdahulu (Lou et al., 2004) menyimpulkan bahwa layanan kesehatan reproduktif dan Pendidikan seks sangat memberikan efek serta dampak positif untuk penggunaan alat kontrasepsi bagi pemuda di Shanghai.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa penyuluhan program keluarga berencana (KB) memiliki peranan yang sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan dan mengubah perilaku masyarakat dalam menjalankan atau melakukan program KB tersebut. Menurut peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh pemerintah, penyuluhan ialah kegiatan penyampaian informasi dan edukasi tentang program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga dalam rangka meningkatkan pengetahuan sikap serta perilaku baik individu, keluarga maupun masyarakat. Sedangkan penyuluh KB didefinisikan sebagai PNS yang memnuhi kualifikasi dan standar kompetensi tertentu serta diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, penggerakan dan pengembangan program kependudukan, keluarga berencana (KB) dan pembangunan keluarga (BKKBN, 2019).

Mengingat pentingnya peranan penyuluhan dalam menyukseskan program serta meningkatkan jumlah akseptor KB, serta dengan mempertimbangkan sejumlah penelitian terdahulu sebagaimana telah diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan untuk menelusuri lebih lanjut mengenai peran penyuluhan program keluarga berencana (KB) yang dilakukan di Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung terhadap peningkatan pengetahuan akseptor terhadap KB tersebut.

2. MASALAH DAN RUMUSAN PERTANYAAN

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung alasan pemilihan Kecamatan ini dikarenakan Kecamatan Teluk Betung Timur merupakan salah satu Kecamatan yang tertinggal dengan asumsi bahwa masyarakat kurang mendapat dan menerima informasi tentang program KB dan masih banyak masyarakat yang memiliki pemikiran bahwa "*Banyak anak banyak rezeki*" serta adanya anggapan bahwa banyak anak lebih baik karena dapat membantu menambah penghasilan rumah tangga atau memiliki nilai sebagai tenaga kerja dan masih sedikit masyarakat yang dasar akan pentingnya pemakaian alat kontrasepsi atau ikut melaksanakan program KB. Oleh karena alasan tersebut, peneliti memilih Kecamatan Teluk Betung Timur untuk dijadikan sebagai subjek atau tempat penelitian.



3. KAJIAN PUSTAKA

a. Definisi Peran

Peran dapat didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan oleh masyarakat terhadap orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (*role-set*). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus (Merton dalam Raho, 2007:67).

b. Definisi Penyuluh Keluarga Berencana (KB)

Penyuluh Keluarga Berencana merupakan ujung tombak pengelola KB di lingkungan lapangan. Undang-Undang RI No. 52 Tahun 2009 tentang *Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga* dan Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2010 tentang *Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional* menyatakan bahwa BKKBN mempunyai tugas melaksanakan tugas

pemerintah di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana, agar amanat tersebut dapat terimplementasikan perlu ditetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

Salah satu NPSK sesuai Undang-Undang RI No 52 Tahun 2009 adalah Pedoman Penyediaan dan Pemberdayaan Tenaga Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana di Lingkungan Pemerintah Daerah, hal ini telah sesuai dengan pasal 38 yaitu di BKKBN ditetapkan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana sesuai dengan kebutuhan.

Penyuluh Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat PKB, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, evaluasi, dan pengembangan Keluarga Berencana Nasional.

c. Fungsi Penyuluh Keluarga Berencana

- i. Wakil BKKBN Kabupaten/Kotamadya di tingkat Kecamatan.
- ii. Pembantu teknis camat sebagai penanggung jawab operasional program KB Nasional di tingkat kecamatan.
- iii. Atasan langsung dari PKB dan staf PKB.

d. Sepuluh Langkah Kerja Keluarga Berencana

Selain mengetahui dan memenuhi Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tersebut maka yang wajib harus diketahui oleh PKB/PLKB adalah 10 (sepuluh) langkah kerja, antara lain:

- i. Pendekatan tokoh formal
- ii. Pendekatan tokoh informal
- iii. Pendataan dan pemetaan
- iv. Pembentukan kesepakatan
- v. Penegasan kesepakatan
- vi. Penerangan dan motivasi
- vii. Peneladanan/pembentukan grup pelopor
- viii. Pelayanan teknis
- ix. Pembinaan
- x. Pencatatan pelaporan dan evaluasi

e. Definisi Keluarga Berencana (KB)

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 199 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera dalam pasal 1 disebutkan bahwa keluarga berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengatur kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.

f. Tujuan dan Sasaran Keluarga Berencana (KB)

Tujuan dan sasaran dari program KB, berdasarkan BKKBN (2005:20) adalah sebagai berikut:

- i. Pemenuhan permintaan masyarakat akan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang berkualitas dalam upaya menurunkan angka kelahiran, angka kematian ibu, bayi

- dan anak, serta penanggulangan masalah kesehatan reproduksi.
- ii. Peningkatan pemahaman, pengetahuan, sikap dan perilaku positif remaja tentang kesehatan dan hak-hak reproduksi, guna meningkatkan derajat kesehatan reproduksi dalam rangka menyiapkan kehidupan berkeluarga untuk mendukung upaya peningkatan kualitas generasi mendatang.
 - iii. Peningkatan kesejahteraan dan ketahanan keluarga dengan memperhatikan kelompok usia penduduk berdasarkan siklus hidup yaitu mulai dari janin dalam kandungan sampai dengan lanjut usia. Dalam rangka membangun keluarga kecil berkualitas.
 - iv. Pembinaan kemandirian dan peningkatan cakupan dan mutu pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, serta ketahanan dan pemberdayaan keluarga, terutama yang diselenggarakan oleh instansi masyarakat di daerah perkotaan dan pedesaan.

4. METODE

Metode yang digunakan ialah peran penyuluhan program keluarga berencana (KB) di Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung ialah secara langsung. Yang melalui beberapa tahapan antara lain:

- a. Tahap persiapan
Sebelum kegiatan dimulai penyuluh menyiapkan sarana dan prasarana seperti poster, leaflet, daftar hadir dan sound sistem. Kemudian menentukan jadwal dengan para peserta mengenai waktu dan tempat akan dilaksanakannya penyuluhan. Sedangkan materi penyuluhan sudah dipersiapkan sebelum kegiatan dengan menggunakan media berupa poster ataupun leaflet.
- b. Tahap pelaksanaan
Kegiatan penyuluhan dilaksanakan pada pukul 08.00 WIB. Kegiatan dilaksanakan menggunakan metode offline (secara langsung) yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung. Kegiatan ini dibagi menjadi 4 sesi, yaitu: pembukaan, penjelasan materi penyuluhan, tanya jawab dengan peserta, dan penutup.
- c. Tahap evaluasi
 - i. Struktur
Peserta yang hadir sebanyak kurang lebih sebanyak 50 orang. Penyuluhan berlangsung melalui metode offline menggunakan media berupa leaflet ataupun poster yang dibagikan secara langsung kepada peserta. Peserta dapat memahami dengan baik tentang apa yang disampaikan oleh tenaga penyuluh. Peran dan aktivitas tim penyelenggara telah sesuai dengan tugas masing-masing. Perlengkapan sarana dan prasarana yang digunakan sudah lengkap sesuai dengan yang sudah direncanakan yaitu, materi penyuluhan, tempat kegiatan, media poster atau leaflet.
 - ii. Proses
Pelaksanaan kegiatan penyuluhan berlangsung pada pukul 08.00 WIB dan berakhir pukul 09.45 WIB. Kegiatan berjalan lancar sesuai rencana. Peserta penyuluhan aktif dalam

kegiatan penyuluhan, dan peserta penyuluhan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai presentasi penyuluhan yang disampaikan. Seluruh peserta penyuluhan mengikuti kegiatan sampai akhir.

iii. Hasil

Peserta dapat memahami, menerapkan serta mengikuti program pelaksanaan Keluarga Berencana (KB).

5. PEMBAHASAN

Kegiatan peran penyuluhan tentang program keluarga berencana (KB) yang dilakukan di Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung merupakan sebuah upaya yang paling efektif dilakukan karena dengan dilakukannya penyuluhan tersebut tentunya dapat meningkatkan pengetahuan dan mengubah perilaku masyarakat dalam menjalankan atau melakukan program KB tersebut.

Dengan adanya peran penyuluhan tentang program keluarga berencana (KB) diharapkan untuk masyarakat Kecamatan Teluk Betung Timur dapat menerapkan serta memahaminya dengan baik sehingga dapat membantu pertumbuhan ekonomi yang membaik dan terhindar dari kondisi kemiskinan karena terlalu banyak anak atau keturunan.



(Kegiatan Foto bersama dengan Ibu-Ibu di Kecamatan Teluk Betung Timur)



(Dokumentasi Kegiatan Penyuluhan bersama masyarakat di Kecamatan Teluk Betung Timur)

6. KESIMPULAN

Masyarakat di Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung dapat memahami, mengerti terkait materi penyuluhan tentang KB yang telah disampaikan oleh pemateri. Selain itu dengan adanya penyuluhan ini diharapkan masyarakat bisa menerapkan dan melaksanakan program KB pada kehidupan nyata.

7. DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas. (2010). *Evaluasi Pelayanan Keluarga Berencana Bagi Masyarakat Miskin (Keluarga Prasejahtera/Kps Dan Keluarga Sejahtera-I/Ks-I*. Bappenas
- BKKBN. (2019). Peraturan BKKBN RI No 5 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. https://jdih.bkkbn.go.id/public_assets/file/c2dfcb95fd30b26dd774d9e930644786.pdf
- BKKBN. 2008. *Rapat Kerja Program KB Nasional tahun 2008: Evaluasi Program KB Nasional Tahun 2005-2007*, Jakarta: BKKBN.
- Lou, C.-H., Wang, B., Shen, Y., & Gao, E.-S. (2004). Effects of a community-based sex education and reproductive health service program on contraceptive use of unmarried youths in Shanghai. *Journal of Adolescent Health*, 34(5), 433-440. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2003.07.020>.
- Nurmahdalena, A., Display, D., Berencana, P. K., & Belakang, L. (2016). *Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk*. 4(4), 4869-4881.

- Suwardono, B. P., Fatah, M. Z., & Farid, N. N. (2020). Description of the Low Participation of Family Planning Acceptor in Bangkalan Regency. *Jurnal PROMKES*, 8(1), 121. <https://doi.org/10.20473/jpk.v8.i1.2020.121-131>
- Utami, F. P., Matahari, R., & Sugiharti, S. (2020). *Populasi Akses Pasangan Usia Subur (PUS) Miskin terhadap Informasi Keluarga Berencana (KB) di Kota Yogyakarta Abstrak Poor Couples of Childbearing Age Access to Family Planning Information in Yogyakarta City Abstract*. 28, 63-77.